

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang distribusi Dana Desa untuk pemerataan pembangunan infrastruktur antar dusun di Desa Suwatu, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, dapat dijelaskan beberapa temuan utama. Dari sisi pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur, secara administratif pemerintah Desa Suwatu telah menjalankan prosedur sesuai aturan yang berlaku. Pada tahun 2024, Dana Desa sebesar Rp723.900.000 dialokasikan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023, yang menetapkan 44% untuk infrastruktur, pemberdayaan, dan pembinaan desa. Namun, di balik kelengkapan administrasi tersebut, terdapat persoalan yang lebih mendasar. Formulasi alokasi dana yang sebenarnya sudah mempertimbangkan faktor kemiskinan dan kesulitan geografis tidak disampaikan secara jelas kepada masyarakat, terutama warga yang tinggal di dusun terpencil. Musyawarah Desa yang seharusnya menjadi ruang partisipasi seluruh warga justru masih didominasi sekelompok orang tertentu, sehingga suara masyarakat dari dusun yang tertinggal sering kali tidak terdengar. Akuntabilitas pengelolaan dana pun lebih banyak berorientasi ke atas, yaitu kepada kecamatan dan kabupaten, sementara pertanggungjawaban kepada warga di tingkat bawah masih belum optimal.

Dalam menentukan penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur, pemerintah desa secara resmi menggunakan acuan seperti kondisi geografis, tingkat kemajuan infrastruktur yang sudah ada, serta angka kemiskinan

tiap dusun. Namun hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa ada faktor–faktor lain yang secara praktik lebih kuat memengaruhi distribusi anggaran. Kemudahan teknis pengerjaan proyek, kemampuan swadaya masyarakat, serta kedekatan dusun dengan pusat pemerintahan desa secara tidak langsung membuat Dusun Ngijo yang kondisinya lebih maju terus mendapat perhatian lebih, sedangkan Dusun Mlangse yang paling membutuhkan justru mendapat alokasi paling kecil.

Mengenai pemerataan pembangunan infrastruktur antar dusun, kondisi di lapangan cukup memprihatinkan. Data Indeks Pembangunan Desa tahun 2024 menunjukkan adanya ketimpangan yang nyata: Dusun Ngijo dengan skor 73,5 termasuk kategori maju, Dusun Banaran dengan skor 60,5 tergolong berkembang, sedangkan Dusun Mlangse dengan skor 55,5 masih tertinggal. Jika dilihat dari pemerataan antar wilayah, infrastruktur yang dibangun belum terdistribusi secara proporsional karena dusun yang sudah maju cenderung tetap mendapat tambahan alokasi. Dari sisi pemerataan antar sektor, pembangunan masih sangat terfokus pada infrastruktur jalan, sementara kebutuhan dasar seperti penerangan umum dan sanitasi di dusun tertinggal belum terlayani secara optimal. Dari sisi pemerataan antar golongan, warga di dusun terpencil juga belum bisa menikmati manfaat infrastruktur secara setara karena keterbatasan akses informasi dan minimnya keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Ironisnya, sebagian besar perangkat desa justru menilai bahwa pembangunan sudah merata, padahal pandangan ini sangat berbeda dengan kenyataan yang dirasakan langsung oleh warga dusun tertinggal.

4.2 Saran

Hasil penelitian mengenai distribusi Dana Desa untuk pemerataan pembangunan infrastruktur antar dusun di Desa Suwatu menghasilkan beberapa saran yang dapat diterapkan agar pengelolaan Dana Desa ke depan lebih baik dan lebih berkeadilan:

1. Pemerintah Desa Suwatu perlu memperbaiki mekanisme Musyawarah Desa agar tidak didominasi oleh kelompok atau dusun tertentu. Secara konkret, hal ini dapat dilakukan dengan memastikan setiap dusun termasuk Dusun Mlangse yang selama ini kurang terwakili memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan usulan dan mendapatkan tanggapan yang jelas dari pemerintah desa dalam forum tersebut.
2. Penetapan prioritas alokasi anggaran sebaiknya didasarkan secara eksplisit pada data Indeks Pembangunan Desa (IPD) per dusun, sehingga dusun dengan skor IPD terendah mendapat proporsi anggaran yang lebih besar. Hal ini penting untuk mengoreksi pola distribusi yang selama ini lebih dipengaruhi oleh kemudahan teknis dan kedekatan lokasi daripada kebutuhan riil masing-masing dusun.
3. Transparansi informasi anggaran perlu diperluas hingga ke seluruh dusun secara merata. Mengingat Dusun Mlangse tidak memiliki papan informasi pembangunan seperti dusun lainnya, pemerintah desa perlu memastikan akses informasi yang setara sebagai prasyarat pengawasan berbasis masyarakat yang efektif.

4. Pengawasan pengelolaan Dana Desa sebaiknya bergeser dari orientasi kelengkapan dokumen administrasi menuju pengawasan berbasis hasil nyata, dengan menggunakan perkembangan IPD per dusun sebagai tolok ukur keberhasilan distribusi yang berkeadilan.